

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dapat selesai tepat pada waktunya.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan perencanaan lanjutan setelah melalui proses pembahasan rancangan renja baik melalui proses forum OPD, Musrenbang Kecamatan maupun melalui proses Musrenbang Kabupaten yang dilakukan secara berjenjang dengan harapan untuk menjaga konsistensi dan sinergitas dokumen perencanaan.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pedoman semua pihak dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman di Tahun 2021.

Pariaman, Juli 2020

Kalaksa
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Padang Pariaman



BUDI MULYA, ST, M.Eng
NIP. 19770702 200501 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR	
ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	4
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi	24
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD	26
3.3. Program Dan Kegiatan OPD	27
BAB IV PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun lima dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021, yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap OPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman kepada Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu (lima) tahun.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi. Renja OPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sbelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang No. 23 tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
8. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan penganggaran di tahun 2021. Adapun tujuannya adalah mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD. Landasan hukum memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
2. Bab 2 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisa kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Pada evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Analisis kinerja pelayanan OPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja mengenai koordinasi dan sinergi program dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.
3. Bab 3 Tujuan, sasaran, program dan kegiatan, memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja OPD, dan program dan kegiatan. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yaitu penalaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Sedangkan program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, baik jenis program/kegiatan dan pagu indikatifnya.
4. Bab 4 Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, memuat tabel matrik Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021.
5. Bab 5 Penutup, memuat kesimpulan dan saran pelaksanaan Rencana Kerja.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Gambaran Umum Kinerja SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan kabupaten di bidang penanggulangan bencana daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada.

Pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 secara umum selaras dengan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2019, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran pada tahun bersangkutan. Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2019. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2019 dan perkiraan capaian target 2020.

2.1.2. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.

2.1.3. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dan DPA Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman selaku OPD memperoleh target pendapatan dan alokasi anggaran belanja, realisasi belanja secara keseluruhan hanya sebesar Rp. 8.314.147.399,00 atau 98,55 % dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 8.430.905.210,57

Hasil Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Tabel 2.1

Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019

No	Uraian	Pagu Dana (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	739.875.000,00	713.023.081,00	96,37
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	218.000.000,00	209.887.630,00	96,28
3	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	170.000.000,00	162.750.000,00	95,74
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.196.000,00	28.185.000,00	99,96
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per U-U	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.000.000,00	17.986.100,00	99,65
7	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	269.679.000	258.214.351,00	95,75
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.112.025.000,00	1.106.146.185,00	98,52
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	151.825.000,00	150.125.000,00	98,88
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	120.000.000,00	119.978.625,00	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	278.419.500,00	274.375.985,00	98,55
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,00	9.970.000,00	99,70

5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona	436.780.000,00	436.780.000,00	100,00
6	Rehabilitasi sedag/berat gedug kantor	115.000.000,00	114.916.075,00	99,93
III	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	25.410.054,00	99,67
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	24.917.500,00	99,67
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	74.300.000,00	74.031.293,00	99,64
1	Penyusunan Lap.Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.100.000,00	31.001.074,00	99,80
2	Penyusunan Rencana Kinerja, Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	43.200.000,00	43.030.219,00	99,61
V	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	2.059.390.962,00	2.052.886.931,00	99,68
1	Monitoring Evaluasi dan Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	63.300.000	62.917.581,00	99,40
2	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	149.540.000,00	148.871.272,00	99,55
3	Operasional dan Kesiagaan Posko Penanggulangan Bencana	320.511.334,00	319.561.837,00	99,33
4	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	1.526.039.628,00	1.521.536.241,00	99,70
VI	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi bencana	546.633.360,00	527.342.715,00	96,47
1	Peningkatan Peran Forum Pengurangan Resiko Bencana	370.391.000,00	358.985.979,00	99,62
2	Pertemuan rutin Tahunan Upaya Pengurangan Risiko Bencana	76.060.000,00	72.220.700,00	94,95
3	Pelatihan Satgas TRC, Pusdalop PB, Petugas Gudang dan Logistik Penanggulangan Bencana	100.182.036,00	96.136.036,00	95,96
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	764.247.002,00	743.599.323,00	97,30
1	Pengadaan Alat Komunikasi Bencana	100.000.000,00	94.678.700,00	94,68

2	Pemeliharaan Peralatan Komunkasi Bencana	270.810.000,00	269.351.500,00	99,45
3	Pemeliharaan dan Pembelian Peralatan Penyelamatan Darurat Bencana	212.500.000,00	210.082.452,00	98,83
4	Pengelolaan dan Pemeliharaan Gudang Logistik	130.857.002,00	119.613.671,00	91,41
5	Penyediaan dan Pendistribusian Logistik Kebencanaan	50.000.000	49.873.000,00	99,75
VIII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	330.000.000,00	325.309.000,00	98,58
1	Survey Lanjutan untuk Software Data Base Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	130.000.000,00	128.147.000,00	98,57
2	Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana	100.000.000,00	98.965.000,00	98,570
3	Revisi Software Database Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100.000.000,00	98.197.000,00	98,20
IX	Program Peningkatan Mitigasi Bencana	685.709.000,00	674.641.824,00	98,39
1	Penyusunan Dokumen Kajian Daerah Potensi Bencana	535.709.000,00	533.546.474,00	99,60
2	Sosialisasi dan Simulasi Mitigasi Bencana	150.000.000,00	141.095.350,00	94,06

2.1.4. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

2.1.4.1. Program Administrasi Perkantoran

Program administrasi Perkantoran terdiri dari 7 kegiatan yang merupakan kegiatan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman, program ini menyerap dana sebesar Rp. 713.023.081,00 atau 96,37 % dari total anggaran sebesar Rp. 739.875.000,00

TABEL 2.2
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM/ KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			PLAFON ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
	TARGET	REALISASI	SATUAN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				739.875.000	739.875.000	96,37
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	Tahun	28.000.000	28.000.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	tahun	218.000.000	209.887.630	96,28
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	1	Tahun	170.000.000	162.750.000	95,74
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	1	Tahun	28.196.000,00	28.185.000	99,96
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	Tahun	8.000.000	8.000.000	100
Penyediaan Makanan dan Minuman	1	1	Tahun	18.000.000	17.986.100	99,92
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1	1	Tahun	269.679.000	258.214.351	95,75

2.1.4.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 6 kegiatan meliputi Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yaitu pembelian 1 (unit) Laptop dan 1 (satu) unit printer kantor serta Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas, kendaraan dinas operasional termasuk Bahan Bakar Minyak dan oli sebanyak 6 (enam) kendaraan roda 4 dan 6 (enam) unit kendaraan roda dua. Program ini dapat menyerap dana sebesar Rp. 1.106.146.185- atau 99,47 % dari total anggaran sebesar Rp. 1.112.025.000.-

TABEL 2.3
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM/ KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			PLAFON ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
	TARGET	REALISASI	SATUAN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				248.575.947	203.958.043	98,52
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3	3	Unit	151.825.000	150.125.000	99,98
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	1	1	Unit	120.000.000	119.978.625	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	12	Unit	278.419.500	274.375.985	98,55
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1	1	Tahun	10.000.000	9.970.000	99,70
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	1	Unit	436.780.000	436.780.500	100
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	1	Unit	115.000.000	114.916.075	99,93

2.1.4.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur berupa Kegiatan Bimbingan Teknis untuk ASN yang ada di OPD BPBD sehingga menambah pengetahuan tentang pemerintahan.

TABEL 2.4
REALISASI ANGGARAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM/ KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			PLAFON ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
	TARGET	REALISASI	SATUAN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				25.000.000	24.917.000	99,40
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pundang-undangan	1	1	Tahun	25.000.000	24.917.000	99,40

2.1.4.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Anggaran Rp. 31.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 31.001.074,- atau 99,80 % telah menghasilkan 4 (empat) dokumen kerja OPD BPBD berupa dokumen pelaporan LAKIP Tahun 2019, LPPD Tahun 2019, Keuangan persemester dan Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran SKPD dengan Anggaran Rp. 43.030.219,- dan realisasi sebesar Rp. 43.030.074 atau 99,61% telah menghasilkan 6 (enam) yaitu dengan hasil tersusunya dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019, Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019, Renja 2019, Revisi Renstra, RKA Perubahan 2019, RKA 2019 dan DPA Perubahan 2019.

TABEL 2.5**REALISASI ANGGARAN****PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

PROGRAM/ KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			PLAFON ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
	TARGET	REALISASI	SATUAN		Rp	%

1	2	3	4	5	6	5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pealporan Capaian Kinerja dan Keuangan				74.300.000	74.031.500	99,93
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Dokumen	31.100.000	31.001.074	99,80
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	Dokumen	43.200.000	43.030.219	99,61

2.1.4.5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program Pencegahan memiliki 4 (empat) kegiatan yang mendukung program pencegahan dini dalam penanggulangan korban bencana alam yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.059.390.962,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.052.886.931,- atau 99,68 %. Pada Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam melakukan pembuatan baliho, stiker dan spanduk informasi potensi bencana alam. Dengan disebarinya stiker dan spanduk diharapkan masyarakat lebih mengetahui tentang potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Padang Pariaman serta sebagai sarana memberikan informasi kebencanaan. Kegiatan Operasional dan Kesiagaan Posko Penanggulangan Bencana digunakan untuk Pembayaran premi asuransi jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sebanyak 9 (sembilan) orang petugas Pusdalops-PB yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman serta pembayaran gaji swakelola petugas Pusdalops-PB. Kegiatan Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana digunakan untuk pembayaran gaji swakelola petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, pembayaran uang saku kejadian selama satu tahun serta pembayaran premi asuransi jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

TABEL 2.6

REALISASI ANGGARAN**PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM**

PROGRAM/ KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			PLAFON ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
	TARGET	REALISASI	SATUAN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	5
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				1.939.885.917	1.873.455.759	99,71
Monitoring Evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1	1	Tahun	63.300.000	62.917.581	99,40
Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam	1	1	Tahun	149.540.000	148.871.272	99,55
Operasional dan Kesiagaan Posko Penanggulangan Bencana	1	1	Tahun	320.511.334	319.561.837	99,70
Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	1	1	Tahun	1.526.039.628	1.521.536.241	99,70

2.1.4.6 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana mempunyai 3 (tiga) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 546.633.360,- dan realisasi sebesar Rp. 527.342.715,- atau 96,47 %.

1. Kegiatan Peran Forum Pengurangan Resiko Bencana telah melaksanakan Jambore Pengurangan Resiko Bencana tingkat Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Sariak diikuti oleh 17 Kecamatan yang tergabung dalam KSB (Kelompok Siaga Bencana) di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Kegiatan Peran Forum Pengurangan Risiko bencana Jambore Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Mentawai dan diikuti seluruh BPBD yang ada di Sumatera Barat
3. Kegiatan Peran Forum Risiko Bencana Jambore Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Nasional yang dilakukan di Provinsi Bangka Belitung
4. Kegiatan Pertemuan Rutin Tahunan Upaya Pengurangan Risiko Bencana,
5. Kegiatan Pelatihan Satgas TRC, Pusdalop PB, dan Petugas Gudang Logistik Penanggulangan Bencana, yang dilakukan di Nagari Kampung Bendang, Kec. VII Koto Sei sariakKab. Padang Pariaman

TABEL 2.7

REALISASI ANGGARAN

PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA

PROGRAM/ KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			PLAFON ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
	TARGET	REALISASI	SATUAN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	5
Program peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana				546.633.360	527.342.715	96,47
Kegiatan Peningkatan Peran Forum Pengurangan Resiko Bencana	3	3	Kali Kegiatan Jambore	370.391.000	358.985.979	99,62
Pertemuan Rutin Tahunan Upaya Pengurangan Risiko bencana	1	1	Kali Pertemuan	76.060.000	72.220.700	94,95
Kegiatan Pelatihan Satgas TRC, Pusdalop PB, dan Petugas Gudang Logistik Penanggulangan Bencana	1	1	Kali Pelatihan	100.182036	96.136.036	95,96

2.1.4.7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan mempunyai 5 (lima) Kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Pengadaan Alat Komunikasi Kebencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 94.678.700,- atau 94,68 %.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Komunikasi Bencana dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 270.810.000,- dan realisasi sebesar Rp. 269.351.500,- atau 99,45 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan repeater di di bukit selasih.
- c. Kegiatan Pemeliharaan dan Pembelian Peralatan Penyelamatan Darurat Bencana. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 212.500.000,- realisasi Rp. 212.082.452,- atau 98,83 % .
- d. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Gudang logistik, dengan anggaran sebesar Rp. 130.857.002,- dan realisasi sebesar Rp. 119.613.671atau 91,41 %. Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan gudang logistik , pemeliharaan peralatan tanggap darurat yang dimiliki oleh OPD BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Mengingat pentingnya pemeliharaan peralatan tanggap darurat maka petugas gudang logistik sangat diharapkan untuk bisa menjaga dan merawat peralatan yang telah ada.
- e. Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Logistik Kebencanaan, anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 49.873.000,-atau 99,75 %. Memberikan bantuan logistik.

TABEL 2.8

REALISASI ANGGARAN

PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA KEBENCANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			PLAFON ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
	TARGET	REALISASI	SATUAN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	5
Program peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana				338.990.000	338.180.718	99,76

Kegiatan Pengadaan Alat Komunikasi Kebencanaan	1	1	Tahun	19.100.000	19.014.000	99,55
Pemeliharaan Peralatan Komunikasi Bencana	1	1	Tahun	105.250.000	105.239.750	99,99
Pemeliharaan dan Pembelian Peralatan Penyelamatan Darurat Bencana	1	1	Tahun	41.400.000	41.320.500	99,81
Pengelolaan dan Pemeliharaan gudang Logistik	1	1	Tahun	129.090.000	128.521.108	99,56
Penyediaan dan Pendistribusian Logistik Kebencanaan	1	1	Tahun	44.150.000	44.085.360	99,85

2.1.4.8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana memiliki 3 (tiga) kegiatan untuk tahun 2019 ini dengan anggaran sebesar Rp. 330.000.000,- dentingan realisasi anggaran Rp. 325.309.000- atau 98,58 %.

- a) Kegiatan Survey lanjutan untuk software data base rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, telah menghasilkan data survey bangunan rumah tinggal diwilayah pesisir pantai untuk kebutuhan entry data software dan data pasial.
 - 1. Kegiatan Hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2017.
 - 2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
 - 3. Revisi Software database Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

**TABEL 2.9
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA**

PROGRAM/ KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			PLAFON ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
	TARGET	REALISASI	SATUAN		Rp	%

1	2	3	4	5	6	5
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana				330.000.000	325.309.000	98,58
Survey Lanjutan untuk Software Data Base Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1	1	Tahun	130.000.000	128.147.000	98,57
Fasiilitasi dan Koordinasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	1	1	Tahun	100.000.000	98.965.000	98,57
Revisi Software Database Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1	1	Tahun	100.000.000	98.197.000	98,20

2.1.4.9 Program Peningkatan Mitigasi Bencana

Program Peningkatan Mitigasi Bencana memiliki 2 (dua) kegiatan untuk tahun 2019 ini dengan anggaran sebesar Rp. 685.709.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 674.641.824,- atau 98,39 %.

TABEL 2.5
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM/ KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			PLAFON ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
	TARGET	REALISASI	SATUAN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	5

Program Peningkatan Mitigasi bencana				51.200.000	51.162.500	99,93
Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Daerah Potensi Bencana	1	1	Dokumen	535.709.000	533.546.474	99,60
Kegiatan Simulasi dan Sosialisasi Mitigasi bencana	20	20	Lokasi	150.000.000	141.095.350	94,06

TABEL 2.11
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019
KABUPATEN PADANG PADANG PARIAMAN RIAMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)	(Renja SKPD tahun 2018)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.031.03.04.01.01	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	(Indikator Program : Tertib administrasi Pelaksana Keg.)									
1.03.1.03.04.01.01.01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah AYK, Materai, Penggandaan dan cetak dokumen Jukins yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.03.1.03.04.01.01.02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik, sumber daya air dan Faximile yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.03.1.03.04.01.01.07	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Jasa Pengelola Kegiatan dan Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.03.1.03.04.01.01.08	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Kbersihan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.03.1.03.04.01.01.15	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per U-U	Jumlah Pembayaran biaya tagihan koran dan majalah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.03.1.03.04.01.01.17	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pembayaran Kebutuhan makanan dan minuman rapat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.03.1.03.04.01.01.18	7	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100

RENJA 2021 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.031.03.04.01.02	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	(Indikator Program : Persentase Tersedianya sapran pendukung keg.SKPD)								
1.03.1.03.04.01.02.09	8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantorn pendukung kinerja pegawai BPBD	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.03.1.03.04.01.02.22	9	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Jumlah pembayarb pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.03.1.03.04.01.02.24	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	80%	80%	80%	80%	100	80%	80%	100
1.03.1.03.04.01.02.09	11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlahpembayaran peralatan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.03.1.03.04.01.02.42	12	Rehabilitasi sesng/berat gedung kantor	Jumlah Pembayaran rehab gedung /kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
	13	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.031.03.04.01.05	III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	(Indikator Program : Persentase meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Seminar)								
1.03.1.03.04.01.05.03	12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya jumlah pegawai terlatih dan tersertifikasi	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100	10 orang	10 orang	100

RENJA 2021 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.031.03.04.01.06	IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	(indikator program : Persentase peningkatan jumlah pegawai yang disiplin								
1.03.1.03.04.01.06.01	13	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Renstra, RKA, DPA, RKA P, DPA P, RENJA , LAKIP DAN LPPD	80%	80%	80%	80%	100	80%	10 Tempat	100
1.03.1.03.04.01.06.07	14	Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen Renja, RKT, Renstra, Perjanjian Kinerja, RKA, DPARKA Perubahan dan DPA Perubahan yang disusun	80%	80%	80%	80%	100	80%	80%	100
1.031.03.04.01.41	V	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	(Indikator Program : Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana								
1.03.1.03.04.01.41.32	14	Monitoring Evaluasi dan Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah dokumen yang berisikan laporan dari kajian hasil Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Kab. Padang Pariaman	80%	80%	80%	80%	100	80%	80%	100
1.03.1.03.04.01.41.01	15	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah terpantaunya lokasi rawan bencana dan tersebarluanya Informasi kebencanaan melalui papan informasi , media cetak, dan	80%	80%	80%	80%	100	80%	80%	100

RENJA 2021 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			media elektronik								
1.03.1.03.04.01.41.07	16	Operasional dan Kesiagaan Posko Penanggulangan Bencana	Jumlah Operasional Kesiapsiagaan Posko bencana yang disediakan	80%	80%	80%	80%	100	80%	80%	100
1.03.1.03.04.01.41.27	17	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Jumlah pembayaran gaji dan uang kejadian untuk anggota TRC	80%	80%	80%	80%	100	80%	80%	100
1.031.03.04.01.45	VI	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	(Indikator Program : Persentase Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana)								
1.03.1.03.04.01.45.01	19	Peningkatan Peran Forum Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Terlaksananya Jambore Pengurangan Resiko Bencana Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100	2 Kali	2 Kali	100
1.03.1.03.04.01.46	40	Pertemuan Rutin Tahunan Upaya Pengurangan Risiko	Jumlah Peremuan rutin tahunan yang diadakan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100	1 Kali	1 Kali	100
1.03.1.03.04.01.46	20	Pelatihan Satgas TRC, Pusdalop PB, dan Peugas Gudang Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah Personil anggota TRC, PusdalopPB, Gudang dan Logistik yang terlatih	2 kalit	2 kali	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	100
1.03.1.03.04.01.46	VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	(Indikator Program : Meningkatnya sarana dan prasarana tentang kebencanaan)								

RENJA 2021 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)	(Renja SKPD tahun 2018)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.03.1.03.04.01.46.01	20	Pengadaan Alat Komunikasi Kebencanaan	Jumlah tersedianya Alat komunikasi Kebencanaan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100
1.03.1.03.04.01.46.02	21	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi Bencana	Jumlah Terpeliharanya Repeater, dan EWS disepanjang Pesisir Pantai	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.03.1.03.04.01.46.03	22	Pemeliharaan dan Pembelian Peralatan Penyelamatan Darurat Bencana	Jumlah Tersedianya 2 rak perahu karet dan 20 pelampung	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.03.1.03.04.01.46.04	23	Pengelolaan dan Pemeliharaan Gudang logistik	Terkelolanya gudang logistik, terpeliharanya peralatan tanggap darurat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.03.1.03.04.01.46.05	24	Penyediaan dan Pendistribusian Logistik Kebencanaan	Jumlah tersalurnya bantuan logistik kepada korban bencana alam	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.03.1.03.04.47,02	VII I	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	(Indikator Program :Tersedianya data bangunan di daerah rawan bencana)								
		Survey lanjutan untuk Software Database Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlh Database Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana yang tercatat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
		Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana	Jumlah Dokumen dalam fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Kajian Kebutuhan Pasca bencana	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
		RevisiSoftware Database Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	Jumlah Software Data base dalam Rehab Rekon Pasca Bencana	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
		Program Peningkatan Mitigasi Bencana	(Indikator Program :PersentaseTersedianya data bangunan di daerah rawan bencana)								

RENJA 2021 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Dokumen Kajian Daerah Potensi Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Daerah Bencana yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumenn	1 Dokumen	100
	Sosialisai dan Simulasi Mitigasi Bencana	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Simulasi yang dilaksanakan Penyelamatan akibat bencana	10 Tempat	10 Tempat	10 Tempat	10 Tempat	100	10 Tempat	10 Tempat	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun Sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan namun belum lagi optimal.

Melihat kondisi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman selaku Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai lembaga teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah mencoba untuk mensinergikan perencanaan pembangunan melalui :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun Capaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rensta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 sebagaimana kita lihat pada table berikut ini :

TABEL 2.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Indikator	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020

					9	0		8	9	
1	Indeks Resiko Bencana	I K U	2	2	6	10	0	2	4	6
2	Respon Time Tanggap Darurat		14 Menit							
3	Persentase Pemenuhan Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		34%	35%	35,5%	36%	34%	35%	36%	36,5%

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugasnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

a) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Mempunyai Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- 4) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- 7) Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi;
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 10) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

b) Kepala Pelaksana

- 1) Menyusun rencana kegiatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 4) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana;
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- 8) Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- 9) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- 10) Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan ketatalaksanaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan memberikan saran pertimbangan Kepala atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- 12) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, dan menganalisis pelaksanaan kegiatan di Sekretariat meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, dan program serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan badan sesuai dengan pedoman dan peraturan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program;

d) Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas Menyiapkan perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, mengatur dan meneliti pelaksanaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, menyiapkan bahan pembinaan, kebijakan teknis dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan agar terlaksana tugas dengan baik dan benar

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh :

- 1) Kepala Seksi Pencegahan;
- 2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan;

e) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, mengatur dan meneliti pelaksanaan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik, menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup urusan dan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh :

- 1) Kepala Seksi Kedaruratan;
- 2) Kepala Seksi Logistik;

f) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, mengatur dan menilai pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup urusan dan tugas dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peraturan dan ketentuan.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh :

- 1) Kepala Seksi Rehabilitasi
- 2) Kepala Seksi Rekonstruksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan SKPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, esselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

TABEL 2.13
KOMPOSISI PNS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2016

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH MENURUT KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	3	-	3
3.	Strata 1	9	3	12
4.	D.IV	-	-	-
5.	D.III	-	2	2
6.	SLTA	3	-	3

7.	Jumlah	15	5	20
----	---------------	-----------	----------	-----------

Sumber : DUK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019

TABEL 2.14

**KOMPOSISI PNS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2016**

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	12
3.	Golongan II	4
	Jumlah	20

Sumber : DUK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019

Komposisi pejabat eselonering di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.15

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN ESSELONERING**

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
	Jumlah	14 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

Diantara pejabat struktural yang ada, masih banyak yang belum mengikuti pelatihan penjurangan baik untuk eselon III, dan IV. Hal ini disebabkan karena belum adanya dukungan dana yang cukup untuk pelatihan penjurangan yang

diadakan oleh instansi pelaksana. Sampai pada tahun 2019, dari 16 orang pejabat struktural, baru 9 orang pejabat struktural yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang mengikuti pelatihan dimaksud. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.22.
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN PENJENJANGAN

No	Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	Spamen/Diklatpim II	0 orang
2	Spama/ Ditklatpim III	3 orang
3	Adum/Diklatpim IV	6 orang
	Jumlah	9 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Masih kurangnya sumberdaya Manusia baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang telah memiliki Seritifikasi Penanggulangan Bencana tidak memadai.
3. Tidak memadainya anggaran dalam penanggulangan bencana, baik untuk operasional maupun pengadaan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana.
4. Masih terbatasnya tenaga ahli dalam hal penanggulangan bencana daerah.

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD (renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas, khususnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 disusun dengan mempedomani 1) RPJPN Tahun 2005-2025, 2) RPJMN Tahun 2014-2019, 3) RPJPD Provinsi Sumbar 2005-2025, 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025, 5) RPJMD Tahun 2016-2021, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Hal ini untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja SKPD yang dilaksanakan masing-masing SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 merupakan rencana kerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman) Tahun 2016-2021, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Padang Pariaman dengan memperhatikan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 ditetapkan tolok ukur kinerja melalui indikator makro, indikator ekonomi dan sosial.

Dalam konteks perencanaan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada untuk memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, agar mampu membantu masyarakat yang terkena bencana di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga mampu untuk menciptakan masyarakat yang tangguh, tanggap dan tangkas dalam menghadapi bencana.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan sinergitas perencanaan mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan SKPD, maka untuk tahun 2019 pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak ada usulan skala prioritas dari hasil musrenbang Adapun program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana tahun 2019 berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut di atas, peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur".

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2016-2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Sumatera Barat yang strategis dengan pelabuhan laut di pantai barat Sumatera, mendorong Sumatera Barat berperan sebagai pintu gerbang barat Sumatera untuk melakukan ekspor komoditi ke negara-negara timur tengah dan Afrika sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Sumatera Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ditujukan untuk meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran,

mewujudkan masyarakat sadar hukum dan keadilan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kebijakan umum pembangunan daerah yang telah dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun komitmen ini perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sehingga perlu disusun prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 disusun dengan mempertimbangkan ; a) isu-isu strategis memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan, b) potensi dan peluang yang dimiliki, dan c) hal-hal yang mendesak dan penting untuk dilaksanakan. Prioritas pembangunan tersebut bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Dalam Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk dalam Misi 7 yakni “ Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana”

TABEL 3.1

KETERKAITAN ANTARA TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Masyarakat Yang Tangguh Bencana	1	Terwujudnya Kesiapsiagaan dalam Pengurangan Resiko Bencana	1	Indeks Resiko Bencana
		2	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kedaruratan	2	Respon Time Tanggap Darurat

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang Ramah Bencana	3	Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana	3	Persentase Pemenuhan Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
		4	Terwujudnya Keselamatan pada Risiko Bencana	4	Peningkatan Jalur Evakuasi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
2. Meningkatkan pelayanan informasi dan sosialisasi kebencanaan
3. Meningkatkan kapasitas dalam mitigasi bencana dan penanggulangan bencana

3.2 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin OPD, pada tahun 2021, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu badan untuk melaksanakan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (pelayanan dasar), sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang secara keseluruhan meliputi 2 program dan 8 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp 7.643.048.277,-

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, Secara umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 adalah sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.

RENJA 2021 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021									
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN									
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR									
URUSAN : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
NOMOR REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	BELANJA				13.423.908.778,00				9.433.908.778
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.090.908.778,00				2.090.908.778
5 1 1	Belanja Pegawai				2.090.908.778,00				2.090.908.778
5 2	BELANJA LANGSUNG				11.333.000.000				7.343.000.000
1 03 1 03 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	(Indikator Program : Tertib Administrasi Pelaksanaan Kegiatan)			698.000.000				703.000.000
1 03 1 03 04 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan ATK, Materai, penggandaan dan cetak dokumen teknis kerja	BPBD	1 Tahun	28.000.000			1 Tahun	28.000.000
1 03 1 03 04 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik (Instalasi listrik)	Tersedianya jasa telepon, internet, dan listrik	BPBD	1 Tahun	270.000.000		Call Centre	1 Tahun	270.000.000
1 03 1 03 04 01 07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pengelola kegiatan dan keuangan	BPBD	20 Org	165.000.000			20 Org	165.000.000
1 03 1 03 04 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	BPBD	1 Org	27.000.000			1 Org	27.000.000
1 03 1 03 04 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya biaya tagihan Koran dan Majalah	BPBD	1 Tahun	8.000.000			1 Tahun	8.000.000
1 03 1 03 04 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	terpentingnya kebutuhan makanan dan minuman Rapat	BPBD	1 Tahun	20.000.000			1 Tahun	25.000.000
1 03 1 03 04 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar	BPBD	1 Tahun	180.000.000			1 Tahun	180.000.000
1 03 1 03 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	(Indikator Program : Tersedianya sapran pendukung keg.SKPD)			865.000.000				545.000.000
1 03 1 03 04 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	BPBD	1 Tahun	100.000.000			1 Tahun	100.000.000
1 03 1 03 04 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	BPBD	1 Tahun	120.000.000			1 Tahun	120.000.000
1 03 1 03 04 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya gaji sopir	BPBD	13 Kendaraan	175.000.000			13 Kendaraan	175.000.000

RENJA 2021 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021									
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN									
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR									
URUSAN : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
NOMOR REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

RENJA 2021 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1	03	1	03	04	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	BPBD	1 Tahun	50.000.000		1 Tahun	50.000.000
1	03	1	03	04	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tereharganya gedung kantor BPBD	BPBD	1 Tahun	100.000.000		1 Tahun	100.000.000
							Pengadaan Meubiler	Tersedianya meubiler untuk BPBD	BPBD		120.000.000			100.000.000
							Pembuatan Garase Mobil	Tersedianya garase untuk mobil penanggulangan bencana	BPBD	1 Unit	200.000.000			
1	03	1	03	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	(Indikator Program :Peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek,Sosialisasi dan Seminar)			25.000.000			25.000.000
1	03	1	03	04	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya jumlah pegawai terlatih dan tersertifikasi	BPBD	1 Tahun	25.000.000		1 Tahun	25.000.000
1	03	1	03	04	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	(Indikator Program : Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan)			85.000.000			85.000.000
1	03	1	03	04	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dok Renstra, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP dan LPPD	BPBD	1 Tahun	40.000.000		1 Tahun	40.000.000
1	03	1	03	04	06	02	Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD	jumlah rencana kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja, dokumen anggaran (RKA dan DPA awal, RKA dan	BPBD	1 Tahun	45.000.000		1 Tahun	45.000.000
1	03	1	03	04	41		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	(Indikator Program : Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana)			2.910.000.000			2.160.000.000
1	03	1	03	04	41	01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana alam	Terpantainya lokasi rawan bencana dan tersebarluasnya informasi kebencanaan melalui sarana informasi, media	BPBD	1 Tahun	350.000.000		1 Tahun	100.000.000
1	03	1	03	04	41	07	Operasional dan Kesiapsiagaan Posko Penanggulangan Bencana	Terlaksananya kesiagaan posko bencana	BPBD	1 Tahun	350.000.000		1 Tahun	350.000.000
1	03	1	03	04	41	27	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Terbayarnya gaji dan uang kejadian untuk Anggota TRC	BPBD	1 Tahun	1.530.000.000		1 Tahun	1.530.000.000
1	03	1	03	04	05	05	Pelatihan Satgas TRC , Pusdalops PB dan petugas gudang logistik penanggulangan bencana	Jumlah Personil TRC , Pusdalops PB dan petugas gudang logistik yang Terlatih	BPBD	1 Tahun	250.000.000		1 Tahun	100.000.000
1	03	1	03	04	41	32	Monitoring Evaluasi dan Fasilitasi Kegiatan Rehab Rekon Pasca Bencana	Terpantainya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta adanya dokumen yang berisikan laporan dan	BPBD	1 Dokumen	80.000.000		1 Dokumen	80.000.000
							Inovasi "Papa Sadar Bana" dan "Tangkas Aman"	Tersedianya inovasi tentang kebencanaan di BPBD			350.000.000			
1	03	1	03	04	44		Program Peningkatan Mitigasi Bencana	(Indikator Program : Meningkatnya Mitigasi Bencana)			600.000.000			200.000.000
1	03	1	03	04	44	03	Penyusunan Dokumen lanjutan Renkon Gempa Bumi Tsunami	Tersedianya dokumen rencana kontijensi	BPBD	1 Dokumen	600.000.000		1 Dokumen	200.000.000
1	03	1	03	04	45		Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	(Indikator Program : Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Bencana)			2.475.000.000			2.025.000.000
1	03	1	03	04	45	01	Peningkatan upaya Pengurangan Resiko Bencana	meningkatkan kapasitas upaya pengurangan resiko bencana dan terlaksananya kegiatan wajib rutin tahunan	BPBD	6 Kali	400.000.000		4 Kali	400.000.000
1	03	1	03	04	45	02	Koordinasi dan konsolidasi Penanggulangan darurat bencana (Inovasi Maintanance/pemeliharaan/pembinaan untuk Nagari/Desa Tangguh Bencana)	Efektifnya koordinasi penanggulangan darurat bencana	BPBD	1 Tahun	125.000.000		1 Tahun	125.000.000
1	03	1	03	04	45	03	Sosialisasi dan Simulasi Mitigasi Bencana (Inovasi "Sekolah/RSUD/Puskesmas Aman Bencana")	Terlaksananya sosialisasi dan simulasi Penyelamatan akibat Bencana yang melibatkan masyarakat	BPBD		350.000.000	SPM	1 Kali	100.000.000
							Pembentukan Nagari Tangguh Bencana	Terbentuknya Nagari tangguh bencana	BPBD	4 Nagari	1.200.000.000		6 Nagari	1.200.000.000
							Operasional pendampingan kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dari BNPB	Terlaksananya operasional untuk kegiatan desa tangguh bencana		4 Nagari	200.000.000			-
							Peningkatan kapasitas Kelembagaan PRB Kabupaten Padang Pariaman	Terbentuknya Forum PRB Kabupaten Padang Pariaman		5 Kali	200.000.000		5 Kali	200.000.000

RENJA 2021 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021									
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN									
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR									
URUSAN : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
NOMOR REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 1 03 04 46	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	(Indikator Program : Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan)			3.225.000.000				1.150.000.000
1 03 1 03 04 46 01	Pengadaan Alat komunikasi bencana	Tersedianya Alat Komunikasi bencana sesuai perubahan frekuensi dinas berupa HT dan Radio Rig	BPBD	26 Unit	300.000.000			28 Unit	250.000.000
1 03 1 03 04 46 02	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi bencana	Terpeliharanya secara rutin peralatan bencana, Repeater , biaya sewa tanah repeater dan penggantian rutin	BPBD	1 Tahun	350.000.000			1 Tahun	350.000.000
1 03 1 03 04 46 03	Pemeliharaan dan Pembelian Peralatan Penyelamatan Darurat Bencana	Terpeliharanya dan tersedianya peralatan penyelamatan darurat bencana	BPBD	1 Tahun	800.000.000			1 Tahun	200.000.000
1 03 1 03 04 46 04	Pengelolaan dan Pemeliharaan Gudang Logistik	terketoranya gudang logistik dan biaya pengangkutan barang logistik	BPBD	1 Tahun	150.000.000			1 Tahun	150.000.000
1 03 1 03 04 46 05	Penyediaan dan Pendistribusian Logistik Kebencanaan	tersedianya logistik untuk bencana berupa makanan, tenda, material bangunan ,pakaian dll	BPBD	1 Tahun	350.000.000			1 Tahun	200.000.000
	Pengadaan EWS Tsunami	bencana		15 Unit x	1.275.000.000				
1 03 1 03 04 47	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	(Indikator Program :Tersedianya data bangunan di daerah rawan bencana)			450.000.000				450.000.000
1 03 1 03 04 47 02	Survey Lanjutan untuk Sofware Data Base Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Adanya tambahan database Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana Kabupaten Padang Pariaman	BPBD	2000 rumah	150.000.000			2000 rumah	150.000.000
1 03 1 03 04 47 03	Fasilitasi dan koordinasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	pembentukan tim pengkajian pasca bencana dan out putnya pembuatan dokumen pasca bencana	BPBD	1 Kali	200.000.000			1 Kali	200.000.000
1 03 1 03 04 47	Revisi Software Data Base Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Softwre data base rehab recon pasca bencana yang updated	BPBD	1 Software	100.000.000			1 Software	100.000.000

BAB IV PENUTUP

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan jika anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan OPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Limpato

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



BUDI MULYA, ST, M.Eng
NIP. 19770702 200501 1 005